

---

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANJAR DALAM  
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERBATASAN  
JAWA BARAT - JAWA TENGAH TAHUN 2020/2021  
(Studi Kasus Pembangunan Jembatan Ci Jolang II dan Jembatan Pelangi  
Langensari**

**Lintang Karahinan<sup>1</sup>, Tina Cahya Mulyatin<sup>2</sup>, Riza Purnama<sup>3</sup>  
(Times New Roman, Bold, 12pt)**

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Pemerintahan, STISIP Bina Putera Banjar, Indonesia

**Email : cahyamulyatin@gmail.com**

---

**Received:** June 15, 2024

**Revised:** August 13, 2024

**Accepted:** August 26, 2024

---

**Abstrak**

Wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah dalam Pengelolaan Pembangunan jembatan di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah yaitu Jembatan Ci Jolang II dan Jembatan Pelangi Langensari berdasarkan pemahaman bagaimana peran Pemerintah Kota Banjar dalam pengelolaan pelaksanaan pembangunan kedua jembatan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling sebanyak lima (5) orang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori peran dengan dimensi pemerintah sebagai aturan yang membimbing, peran merupakan sebuah konsep individu, dan peran pemerintah yang penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Banjar dalam mengelola pembangunan di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, tepatnya pada pembangunan infrastruktur Jembatan Ci Jolang II yang beralamat di Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat 46331, dan Jembatan Pelangi Langensari yang beralamat di Jalan. Wanareja-Langensari, Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, 46324 yaitu Pemerintah Kota Banjar melaksanakan pembangunan pada wilayah perbatasan tentunya berlandaskan Peraturan Daerah, selanjutnya Pemerintah Kota Banjar memiliki peran aktif sebagai user atau pelaksana, penggagas, dan fasilitator proses perencanaan pembangunan tersebut. Maka dari itu peran Pemerintah Kota Banjar dalam pengelolaan pembangunan wilayah perbatasan tersebut sangat penting demi keberlangsungan proses pembangunan, dan terutama demi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Kota Banjar

Kata kunci: (Peran, Pengelolaan, Pembangunan, Wilayah Perbatasan)

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the role of the Banjar City Government in managing the construction of bridges in the border areas of West Java and Central Java, namely the Ci Jolang II Bridge and the Pelangi Langensari Bridge, based on an understanding of how the Banjar City Government's role in managing the implementation of the construction of the two bridges. The research approach used is a qualitative approach with descriptive methods. The informants selected using the purposive sampling technique were five (5) people.*

*The research approach used is a qualitative approach with descriptive methods. Informants selected by purposive sampling technique as many as five (5) people. In this*

*research, the researcher used role theory with the dimension of government as a guiding rule, role is an individual concept, and the role of government is important.*

*The results showed that the role of the Banjar City Government in managing development in the border areas of West Java and Central Java, to be precise in the construction of the Ci Jolang II Bridge infrastructure which is located at Purwaharja, Purwaharja District, Banjar City, West Java 46331, and Pelangi Langensari Bridge which is located at Road. Wanareja-Langensari, Langensari, Langensari District, Banjar City, 46324, namely the Banjar City Government carries out development in the border area of course based on Regional Regulations, then the Banjar City Government has an active role as a user or executor, initiator and facilitator of the development planning process. Therefore, the role of the Banjar City Government in managing the development of the border area is very important for the sustainability of the development process, and especially for the socio-economic welfare of the community, especially the people of Banjar City.*

**Keywords:** (Role, Management, Development, Border Areas)

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan aksesibilitas masyarakat. Wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik, di mana tantangan pembangunan sering kali dihadapi dengan keterbatasan sumber daya dan akses ke pelayanan publik.

Pada tahun 2020/2021, Pemerintah Kota Banjar berupaya untuk memperkuat infrastruktur di wilayah perbatasan ini melalui proyek pembangunan Jembatan Ci Jolang II dan Jembatan Pelangi Langensari. Jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar arus barang dan jasa, serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.

Namun, keberhasilan pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya bergantung pada aspek fisik semata, melainkan juga melibatkan peran serta pemerintah dalam pengelolaan, perencanaan, serta implementasi proyek. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran Pemerintah Kota Banjar dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur, terutama di daerah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Penelitian ini juga akan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan jembatan, seperti partisipasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Melalui studi kasus pembangunan Jembatan Ci Jolang II dan Jembatan Pelangi Langensari, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi dan kebijakan pemerintah dalam menjawab tantangan pembangunan di wilayah perbatasan.

Dengan pembahasan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Banjar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan infrastruktur, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan di daerah perbatasan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

## LANDASAN TEORI

### Sub-judul

Peran pada dasarnya merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang, sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil. Peran merupakan segenap kewenangan yang dimilikinya untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai kompetensinya (Gaffar, 2007).

Peran merupakan suatu proses dinamis kedudukan atau sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu yang memiliki aturan membimbing dalam kehidupan sosial masyarakat. (Soekanto , Merton, dan Levinson)

1. Pemerintah sebagai rantai aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan konsep yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan merupakan perilaku, posisi atau peran pemerintah (individu) yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

## METODE PENELITIAN

### Sub-judul

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Menurut Dr. Sudaryono (2017: 88).

### Desain Penelitian

Kami menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang menggunakan rumusan masalah yang telah ditentukan untuk membantu peneliti mempelajari situasi sosial yang terjadi secara menyeluruh dan mendalam (Sugiyono, 2015).

### Informasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjar. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu sesuai dengan kepentingan penelitian dalam rangka menjangkau informasi.

Dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan mengenai peran pemerintah kota dalam pengelolaan pembangunan di wilayah perbatasan pada tahun 2021/2022 studi pada pembangunan jembatan Ci Jolang II dan jembatan Pelangi Langensari. Sehingga mereka akan dapat memberikan informasi yang lebih tepat dan akurat. Menurut Moleong (2007: 12) menyebutkan bahwa “kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama.

### Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam implementasi penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua macam data menurut klasifikasi berdasarkan dari jenis dan sumber datanya, yaitu data primer dan data sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembangunan yang dimaksud yaitu tertuju pada pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan objek jembatan Cijolang II dan jembatan Pelangi Langensari. Kedua jembatan tersebut berada di sekitar wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan pelaksanaannya pun direncanakan melalui Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Peran pemerintah merupakan upaya yang secara sadar dilakukan oleh suatu bangsa, Negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat yang maju. Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah juga merupakan sebuah wewenang dan kemampuan untuk mengelola dan melaksanakan program-program pembangunan di daerah termasuk Kota Banjar. Pemerintah Kota Banjar memegang peran untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan wilayah termasuk pada wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang merupakan wilayah prioritas bagi Pemerintah Kota Banjar.

Pembangunan daerah perbatasan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pengelolaan daerah perbatasan menghendaki adanya perhatian yang lebih fokus agar terjadi peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas penduduk di wilayah tersebut. Pembangunan daerah perbatasan memerlukan kerangka penanganannya yang menyeluruh meliputi berbagai sektor pembangunan, koordinasi, serta kerja sama yang efektif mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten atau kota, yang dijabarkan melalui kebijakan makro yang pelaksanaannya bersifat strategis dan operasional dengan mempertimbangkan aspek waktu yang ketat. Dalam pencapaiannya, pembangunan daerah perbatasan perlu dilandasi semangat, konsistensi, serta etika atau moral yang baik dari pihak penyelenggara baik dari pusat maupun di daerah kabupaten atau kota demi mengabdikan kepada bangsa dan negara, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kota Banjar memiliki aturan yang berlandaskan beberapa undang-undang untuk pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah Kota Banjar terutama pembangunan wilayah Kota Banjar dan pembangunan wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemerintah Kota Banjar juga tentunya sangat memiliki peran dalam proses pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan tersebut terutama pada jembatan Ci Jolang II tepatnya daerah Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat 46331 dan jembatan Pelangi Langensari tepatnya daerah Jalan. Wanareja- Langensari, Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, 46324, yaitu memiliki posisi dengan menjadi user atau pelaksana, penggagas, dan fasilitator. Namun tidak hanya pemerintah saja yang ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan kedua jembatan tersebut. Terdapat peran dari masyarakat juga yang membantu untuk menyelesaikan pembangunan kedua jembatan tersebut. Pemerintah Kota Banjar juga memiliki konsep dalam perencanaan pembangunan kedua jembatan tersebut adalah untuk meningkatkan ekonomi terutama dalam perdagangan dan pelayanan jasa. Karena dengan dibuatnya jembatan penghubung antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah akan mempermudah jalur lintas transportasi. Tetapi banyak pula yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar jembatan Ci Jolang II dan jembatan Pelangi Langensari, bahwa pembangunan kedua jembatan tersebut masih belum cukup maksimal, karena dengan sarana prasarana yang belum lengkap, sehingga masyarakat banyak yang masih berkeluh kesah.

Pembangunan wilayah perbatasan merupakan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasiskan pada karakteristik kawasan perbatasan seharusnya memiliki intensitas tinggi dalam arus lalu lintas manusia, barang dan jasa. Adanya berbagai permasalahan dikawasan perbatasan menjadi kendala untuk dapat dikembangkanya daerah kawasan tersebut. Permasalahan dimaksud dapat berupa koordinasi antar instansi, sehingga akan sulit untuk membangun suatu kerja sama antar pelaksana yang berwenang mengelola perbatasan, selain itu persoalan infrastruktur dan kepastian hukum tentu menjadi persoalan tambahan yang patut diperhatikan sebagai suatu tantangan dalam upaya pengembangan wilayah perbatasan.

Perkembangan otonomi daerah telah membawa peluang sekaligus tantangan pada pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) untuk lebih proaktif dan kreatif dalam membangun daerahnya masing-masing. Di mana kerja sama internasional antar kota yang dilaksanakan daerah dapat merupakan suatu inovasi ataupun sebagai alternatif terkait pada upaya pencapaian efisiensi dan efektifitas serta saling menguntungkan dalam pembangunan daerah yang dulunya bersifat sentralistis (top down), menjadi desain tralisasi atau otonomi (bottom up). Namun demikian, hal yang penting dicermati adalah bahwa Pemerintah Daerah bersamasama dengan Pemerintah Pusat perlu menangani masalah perbatasan dan pengelolaan batas terluar Indonesia dengan baik dan tepat.

Pembentukan dan pelaksanaan hubungan baik antar kabupaten, kota dan provinsi yang bertetangga memang diperlukan untuk mencegah timbulnya konflik diantara kedua kabupaten, kota, bahkan provinsi yang berbatas. Selain itu, dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan disertai upaya promosi dan optimalisasi potensi yang ada juga berakibat dapat meminimalisir terjadi nya masalah. Pembangunan infrastruktur pada wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun hasil pembangunan pada wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah tepatnya pada pembangunan Jembatan Ci Jolang II dan Jembatan Pelangi Langensari masih dirasa belum maksimal oleh masyarakatnya, namun Pemerintah Kota Banjar akan terus mengupayakan dan berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur kedua jembatan tersebut, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, maupun pertumbuhan dunia usaha masyarakat khususnya masyarakat Kota Banjar.

### **KESIMPULAN**

Pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, khususnya melalui proyek Jembatan Cijolang II dan Jembatan Pelangi Langensari, menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut memiliki peranan krusial dalam meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah dan pusat sangat penting dalam menjalankan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini, untuk memastikan bahwa semua sektor berkaitan dapat bekerja sama secara efektif.

Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya koordinasi lintas instansi dan infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai menurut masyarakat setempat, komitmen

pemerintah untuk terus memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur tetap ada. Usaha ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transportasi, tetapi juga berpotensi dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan ini. Dengan terus mempromosikan potensi kawasan perbatasan serta melakukan optimalisasi sumber daya, diharapkan pengembangan infrastruktur di daerah perbatasan dapat berlangsung dengan lebih baik, sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- J. Moleong, Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Roesdakarya.
- Gaffar f, Vanessa. 2007. CRM dan MPR Hotel (CRM dan Marketing) Public Relations. Bandung: Alfabeta.
- Sudaryono. (2019). Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung Alfabeta. ilmiah: